



# PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

## BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Jalan Ternate Nomor 2 : Telepon (022) 4235026  
Fax (022) 4203960 Website : bkd.jabarprov.go.id email : bkd@jabarprov.go.id  
Bandung - 40115

### KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT

Nomor : Kep.1615/KPG.04.01/MP/2022

#### TENTANG

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM  
JABATAN PELAKSANA DI LINGKUNGAN  
PERANGKAT DAERAH BADAN PENDAPATAN DAERAH

#### GUBERNUR JAWA BARAT

- Menimbang : a. bahwa untuk penempatan pegawai yang sesuai dengan Standar Kompetensi Jabatan dan juga kebutuhan organisasi dalam rangka pembinaan dan pengembangan karir PNS, dipandang perlu memberhentikan dan mengangkat Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pelaksana di lingkungan Perangkat Daerah Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat;
- b. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang Nama, NIP, Pangkat, Golongan dan Jabatannya yang tercantum dalam Surat Keputusan ini, diberhentikan dan diangkat dalam Jabatan Pelaksana di lingkungan Perangkat Daerah Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat;
- c. bahwa pemberhentian dan pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dimaksud perlu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Jawa Barat.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali; terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengubahan dan / atau Penambahan Nomenklatur Jabatan Pelaksana Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah;



6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Instansi Pemerintah (Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1273);
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat;
8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 96 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 82 Tahun 2020 tentang Kedudukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat;
9. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 70 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 69 Tahun 2017 Tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Cabang Dinas dan UPTD di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat;
10. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 56 Tahun 2020 Tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana bagi Pegawai Negeri Sipil pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat;
11. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pelimpahan Kewenangan Delegasi Penandatanganan Naskah Dinas Kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat;
12. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 067/Kep.846-Org/2021 tentang Hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja serta Peta Jabatan pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.

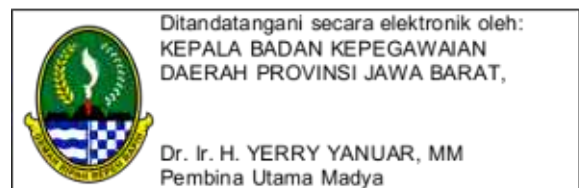
Menimbang : Surat Kepala Perangkat Daerah Badan Pendapatan Daerah Nomor: 2573/KPG.03.01.01/Sekre tanggal 15 Desember 2021 hal Usulan Jabatan Pelaksana Perangkat Daerah Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat.

#### **MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :
- KESATU : Memberhentikan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan pelaksana yang namanya tercantum dalam lampiran I sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini, disertai ucapan terima kasih atas pengabdianannya selama melaksanakan tugas;
- KEDUA : Mengangkat Pegawai Negeri Sipil yang Nama, NIP., Pangkat, Golongan dan Jabatannya tercantum dalam lampiran Keputusan ini dalam Jabatan Pelaksana;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal 1 Februari 2022;
- KEEMPAT : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandung  
Pada tanggal 31 Januari 2022

**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH**



Tembusan :

1. Yth. Inspektur Provinsi Jawa Barat;
2. Yth. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Barat.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara



LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR

: Kep.1615/KPG.04.01/MP/2022

TANGGAL

: 31 JANUARI 2022

TENTANG

: PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM JABATAN PELAKSANA DI PERANGKAT DAERAH BADAN PENDAPATAN DAERAH

NO	NAMA	NIP	PANGKAT/ GOL. RUANG	PENDIDIKAN TERAKHIR	KELAS JABATAN	JABATAN LAMA	UNIT KERJA LAMA	JABATAN BARU	UNIT KERJA BARU
1	Hj. PATIMAH, SE	196506161991012001	Penata TK.I (III/d)	S1	6	PENGELOLA KEPEGAWAIAN	SUBBAGIAN KEPEGAWAIAN, SEKRETARIAT	PENGELOLA KEPEGAWAIAN	SUBBAGIAN KEPEGAWAIAN, SEKRETARIAT
2	ANDI TRIA, S.Sn.	197809032014121001	Penata Muda TK.I (III/b)	S1	7	ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR	SUBBAGIAN KEPEGAWAIAN, SEKRETARIAT	ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR	SUBBAGIAN KEPEGAWAIAN, SEKRETARIAT
3	AGUS ISMAIL ADJIE, S.E.	196603072007011005	Penata Muda TK.I (III/b)	S1	6	PENGELOLA KEPEGAWAIAN	SUBBAGIAN KEPEGAWAIAN, SEKRETARIAT	PENGELOLA KEPEGAWAIAN	SUBBAGIAN KEPEGAWAIAN, SEKRETARIAT
4	DIAN ROSA LINA, S.IP.,M.A.P	199205262014062001	Penata Muda TK.I (III/b)	S2	7	ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR	SUBBAGIAN KEPEGAWAIAN, SEKRETARIAT	ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR	SUBBAGIAN KEPEGAWAIAN, SEKRETARIAT
5	AGUS MAMAN, S.E.	197308092007011005	Penata TK.I (III/d)	S1	6	PENGELOLA KEUANGAN	SUBBAGIAN KEUANGAN DAN ASET, SEKRETARIAT	PENGELOLA KEUANGAN	SUBBAGIAN KEUANGAN DAN ASET, SEKRETARIAT
6	LILIS CARTIKA RESMI, S.E.	197808222008012006	Penata Muda TK.I (III/b)	S1	6	PENGELOLA KEUANGAN	SUBBAGIAN KEUANGAN DAN ASET, SEKRETARIAT	PENGELOLA KEUANGAN	SUBBAGIAN KEUANGAN DAN ASET, SEKRETARIAT
7	MAHPUD, S.Sos.	197001042007011010	Penata Muda TK.I (III/b)	S1	6	PENGELOLA KEUANGAN	SUBBAGIAN KEUANGAN DAN ASET, SEKRETARIAT	PENGELOLA KEUANGAN	SUBBAGIAN KEUANGAN DAN ASET, SEKRETARIAT
8	RIFKY MULKI AKBAR, A.Md.	199109172019031012	Pengatur (II/c)	D3	6	VERIFIKATOR KEUANGAN	SUBBAGIAN KEUANGAN DAN ASET, SEKRETARIAT	PENGOLAH DATA APLIKASI DAN PENGELOLAAN DATA SISTEM KEUANGAN	SUBBAGIAN KEUANGAN DAN ASET, SEKRETARIAT
9	FITRI HANDAYANI, S.S.T.	197510132007012005	Penata (III/c)	D4	6	VERIFIKATOR KEUANGAN	SUBBAGIAN KEUANGAN DAN ASET, SEKRETARIAT	PENGELOLA GAJI	SUBBAGIAN KEUANGAN DAN ASET, SEKRETARIAT
10	OBAR	196901122007011009	Pengatur TK.I (II/d)	SLTA	5	PENGADMINISTRASI KEUANGAN	SUBBAGIAN KEUANGAN DAN ASET, SEKRETARIAT	PENGADMINISTRASI KEUANGAN	SUBBAGIAN KEUANGAN DAN ASET, SEKRETARIAT
11	KUSNADI, S.E.	197607042007011004	Penata Muda TK.I (III/b)	S1	7	BENDAHARA	SUBBAGIAN KEUANGAN DAN ASET, SEKRETARIAT	BENDAHARA	SUBBAGIAN KEUANGAN DAN ASET, SEKRETARIAT
12	DENI RAMDANI, S.E., M.M.	197709132009011008	Penata TK.I (III/d)	S2	7	BENDAHARA	SUBBAGIAN KEUANGAN DAN ASET, SEKRETARIAT	BENDAHARA	SUBBAGIAN KEUANGAN DAN ASET, SEKRETARIAT
13	SINTA DEWI KURNIA, S.E., M.M.	198708102011012002	Penata Muda TK.I (III/b)	S2	7	PENYUSUN LAPORAN KEUANGAN	SUBBAGIAN KEUANGAN DAN ASET, SEKRETARIAT	PENYUSUN LAPORAN KEUANGAN	SUBBAGIAN KEUANGAN DAN ASET, SEKRETARIAT
14	SODIKIN, S.Sos.	197201152007011003	Penata Muda TK.I (III/b)	S1	6	VERIFIKATOR KEUANGAN	SUBBAGIAN KEUANGAN DAN ASET, SEKRETARIAT	PENGELOLA KEUANGAN	SUBBAGIAN KEUANGAN DAN ASET, SEKRETARIAT
15	SANSAN DODY ISKANDAR, S.E.	197306222007011005	Penata Muda TK.I (III/b)	S1	6	VERIFIKATOR KEUANGAN	SUBBAGIAN KEUANGAN DAN ASET, SEKRETARIAT	VERIFIKATOR KEUANGAN	SUBBAGIAN KEUANGAN DAN ASET, SEKRETARIAT
16	FEBY ANDRE, S.E., M.M.	198702062011011002	Penata (III/c)	S2	6	VERIFIKATOR KEUANGAN	SUBBAGIAN KEUANGAN DAN ASET, SEKRETARIAT	VERIFIKATOR KEUANGAN	SUBBAGIAN KEUANGAN DAN ASET, SEKRETARIAT



NO	NAMA	NIP	PANGKAT/ GOL. RUANG	PENDIDIKAN TERAKHIR	KELAS JABATAN	JABATAN LAMA	UNIT KERJA LAMA	JABATAN BARU	UNIT KERJA BARU
126	AHMAD MULYADI, S.A.P.	197603131998031006	Penata (III/c)	S1	6	PENGOLAH DATA PEMERIKSAAN PAJAK	SEKSI PENDATAAN DANPENETAPAN, UPTD PUSATPENGELOLAAN PENDAPATANDAERAH WILAYAH KOTA SUKABUMI	PENGOLAH DATA PEMERIKSAAN PAJAK	SEKSI PENDATAAN DANPENETAPAN, UPTD PUSATPENGELOLAAN PENDAPATANDAERAH WILAYAH KOTA SUKABUMI
127	DEDI MULYANA, S.Sos., M.M.	196610051989031010	Pembina (IV/a)	S2	6	PENGELOLA PAJAK DAERAH	SEKSI PENDATAAN DAN PENETAPAN, UPTD PUSAT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH WILAYAH KOTA SUKABUMI	PENGELOLA PAJAK DAERAH	SEKSI PENDATAAN DAN PENETAPAN, UPTD PUSAT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH WILAYAH KOTA SUKABUMI
128	YAYAT SUPRIATNA, S.H.	196504122007011004	Penata Muda TK.I (III/b)	S1	6	PENGOLAH DATA APLIKASI DAN PENGELOLAAN DATA SISTEM KEUANGAN	SEKSI PENDATAAN DAN PENETAPAN, UPTD PUSAT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH WILAYAH KOTA SUKABUMI	VERIFIKATOR PAJAK	SEKSI PENDATAAN DAN PENETAPAN, UPTD PUSAT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH WILAYAH KOTA SUKABUMI
129	DIKDIK SODIKIN	196602142007011004	Pengatur TK.I (II/d)	SLTA	5	PENGADMINISTRASI UMUM	SUBBAGIAN TATA USAHA, UPTD PUSAT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH WILAYAH KABUPATEN SUKABUMI I CIBADAK	PENGADMINISTRASI UMUM	SUBBAGIAN TATA USAHA, UPTD PUSAT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH WILAYAH KABUPATEN SUKABUMI I CIBADAK
130	DIDIN WAHYUDIN	196905152002121008	Pengatur TK.I (II/d)	SLTA	5	PENGADMINISTRASI SARANA DAN PRASARANA	SUBBAGIAN TATA USAHA, UPTD PUSAT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH WILAYAH KABUPATEN SUKABUMI I CIBADAK	PENGADMINISTRASI SARANA DAN PRASARANA	SUBBAGIAN TATA USAHA, UPTD PUSAT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH WILAYAH KABUPATEN SUKABUMI I CIBADAK
131	RIAN TATANG SUMARNA, S.A.P.	196705111994031006	Penata (III/c)	S1	6	PENGELOLA KEUANGAN	SUBBAGIAN TATA USAHA, UPTD PUSAT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH WILAYAH KABUPATEN SUKABUMI I CIBADAK	PENGELOLA KEUANGAN	SUBBAGIAN TATA USAHA, UPTD PUSAT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH WILAYAH KABUPATEN SUKABUMI I CIBADAK
132	UMAR SYAKIR AMIN, S.S.os.	196710132009011001	Penata Muda (III/a)	S1	6	PENGELOLA PELAPORAN DATA PENERIMAAN	SEKSI PENERIMAAN DAN PENAGIHAN, UPTD PUSAT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH WILAYAH KABUPATEN SUKABUMI I CIBADAK	PENGELOLA LAPORAN DATA PENERIMAAN	SEKSI PENERIMAAN DAN PENAGIHAN, UPTD PUSAT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH WILAYAH KABUPATEN SUKABUMI I CIBADAK
133	ENENG INTAN PURNAMASARI, SE	198310112010012001	Penata Muda (III/a)	S1	6	PENGELOLA KEUANGAN	SEKSI PENERIMAAN DAN PENAGIHAN, UPTD PUSAT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH WILAYAH KABUPATEN SUKABUMI I CIBADAK	PRANATA KEARSIPAN	SEKSI PENERIMAAN DAN PENAGIHAN, UPTD PUSAT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH WILAYAH KABUPATEN SUKABUMI I CIBADAK
134	INA KRISANTI, AKS.,MM.	197302192009012002	Penata TK.I (III/d)	S2	6	PENGOLAH DATA PEMERIKSAAN PAJAK	SEKSI PENERIMAAN DAN PENAGIHAN, UPTD PUSAT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH WILAYAH KABUPATEN SUKABUMI I CIBADAK	PENGOLAH DATA PENAGIHAN PAJAK	SEKSI PENERIMAAN DAN PENAGIHAN, UPTD PUSAT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH WILAYAH KABUPATEN SUKABUMI I CIBADAK
135	PEGGY ANDRIAWAN, S.E.	197711291998031002	Penata (III/c)	S1	6	PENGOLAH DATA PEMERIKSAAN PAJAK	SEKSI PENDATAAN DAN PENETAPAN, UPTD PUSAT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH WILAYAH KABUPATEN SUKABUMI I CIBADAK	PENGOLAH DATA PEMERIKSAAN PAJAK	SEKSI PENDATAAN DAN PENETAPAN, UPTD PUSAT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH WILAYAH KABUPATEN SUKABUMI I CIBADAK



NO	NAMA	NIP	PANGKAT/ GOL. RUANG	PENDIDIKAN TERAKHIR	KELAS JABATAN	JABATAN LAMA	UNIT KERJA LAMA	JABATAN BARU	UNIT KERJA BARU
466	IKIN RADIKIN, S.Sos	197107291998031005	Penata Muda TK.I (III/b)	S1	6	PENGELOLA KEPEGAWAIAN	SEKSI PENGELOLAAN DATA DAN APLIKASI PENDAPATAN, UPTD PUSAT LAYANAN OPERASIONAL PENDAPATAN DAERAH	PENGOLAH DATA	SEKSI PENGELOLAAN DATA DAN APLIKASI PENDAPATAN, UPTD PUSAT LAYANAN OPERASIONAL PENDAPATAN DAERAH

Ditetapkan di Bandung

Pada tanggal 31 Januari 2022

an. GUBERNUR JAWA BARAT

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN  
DAERAH



Ditandatangani secara elektronik oleh:  
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN  
DAERAH PROVINSI JAWA BARAT,

Dr. Ir. H. YERRY YANUAR, MM  
Pembina Utama Madya

